

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pertanian secara luas terbagi menjadi beberapa sub sektor yaitu tanaman pangan hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan dan perkebunan. Salah satu sub sektor yang memiliki kontribusi cukup besar yaitu sub sektor perkebunan. Menurut Direktorat Jendral Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2019 nilai ekspor perkebunan sebesar US\$ 25,38 milyar atau setara dengan Rp. 359,14 triliun. Peranan sub sektor perkebunan yang demikian besar bagi peningkatan pemanfaatan petani dan penyedia bahan baku untuk industri dalam negeri serta sumber devisa negara (Arifin, 2001).

Komoditas yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam perekonomian nasional yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit selain sebagai penyumbang devisa dan sumber pendapatan negara juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang cukup besar. Pada tahun 2018 perkebunan kelapa sawit telah memberikan lapangan pekerjaan untuk 4.279.923 petani kelapa sawit di Indonesia (Direktorat Jendral Perkebunan 2020).

Potensi pengembangan kelapa sawit ini di tanggapinya secara serius oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan pembentukan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang mulai diselenggarakan tahun 2011. ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) merupakan sistem usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikasi ISPO ini bersifat *mandatory* untuk perusahaan kelapa sawit dan bersifat *voluntary* untuk pekebun kelapa sawit

termasuk perkebunan sawit rakyat namun kini menurut peraturan pemerintah telah diperbaharui dalam peraturan presiden No. 44 tahun 2020 yang mewajibkan semua petani memiliki sertifikasi ISPO (Peraturan Kementerian No.11 Tahun 2015).

Menurut Peraturan Kementerian Pertanian No. 11 Tahun 2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan usaha pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit yang berkelanjutan. Berdasarkan data Direktorat Jendral Perkebunan pada tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak 566 sertifikat ISPO yang diberikan kepada perusahaan swasta dan PTP Nusantara sebanyak 98,23 persen atau sebesar 556 buah, koperasi swadya sebanyak 1,06 persen atau 6 buah dan KUD plasma sebanyak 0,71 persen atau sebanyak 4 buah sertifikat. Total luas area yang disertifikasi sebesar 5,185.544 Ha yang mencakup 5.179.308 Ha milik perusahaan dan 6.236 Ha milik koperasi swadaya dan KUD plasma (Direktorat Jendral Perkebunan, 2019).

Menurut Kementerian Pertanian (2020), Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi kelapa sawit yang cukup besar dan merupakan Provinsi yang memiliki luas areal terbesar keenam setelah Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Kontribusi Luas areal perkebunan kelapa sawit Provinsi Jambi pada tahun 2019 sebesar 10,11 persen dari luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia. Selain itu, jumlah petani kelapa sawit di Provinsi Jambi memiliki jumlah terbesar

ketiga setelah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan yakni sebesar 9,84 persen dari jumlah petani di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan sebagai penunjang perekonomian daerah (Lampiran 1).

Petani swadaya penerima sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Bungo, Batanghari dan Merangin. Sertifikasi ISPO di Kabupaten Bungo diterima oleh KUD Karya Mukti pada tahun 2017. Menurut data Direktorat Jendral Perkebunan 2019 sertifikasi ISPO di Kabupaten Batanghari diterima oleh Koperasi Mutiara Bumi di tahun 2018 sedangkan untuk Kabupaten Merangin diterima oleh Koperasi Perkasa Nalo Tantan ditahun 2019. Petani swadaya terutama di Kabupaten Batanghari dalam memperoleh sertifikasi ISPO dibantu oleh pemerintah dengan dana APBD.

Petani yang menerima sertifikasi ISPO memiliki beberapa perbedaan dengan petani Non-ISPO yaitu harga TBS yang lebih tinggi dari harga TBS petani non ISPO hal ini dikarenakan petani ISPO memiliki jaminan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga dalam proses budidaya petani ISPO harus menjalankan prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan yang diatur dalam perundang undangan. Petani yang telah bersertifikasi juga memiliki keunggulan dalam menjamin keberlanjutan usahanya sesuai dengan tujuan ISPO yang juga mengutamakan pelaku usaha menjalankan prinsip pertanian berkelanjutan yang dapat dijadikan kekuatan dalam membantah isu dunia bahwa kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan.

Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi diketahui bahwa Kabupaten Batanghari merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki

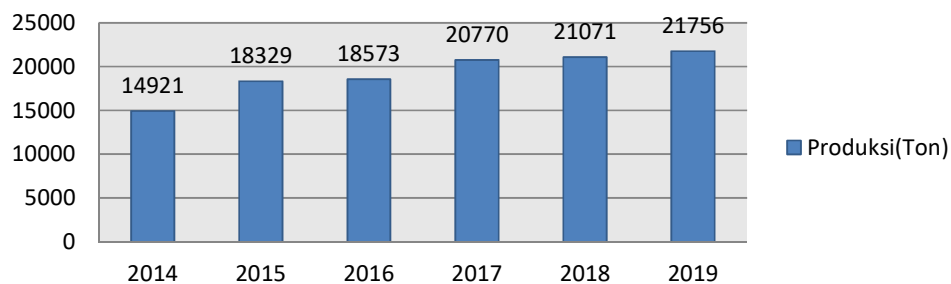
produktivitas kelapa sawit tertinggi di Provinsi Jambi. Hal ini dapat dilihat dari produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Batanghari lebih tinggi 3,3 persen dari produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Merangin dan lebih tinggi 21,10 persen dari produktivitas Kabupaten Bungo pada tahun 2019 dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Kabupaten	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	Batanghari	144.978	245.227	3.786
2	Muaro Jambi	234.863	390.016	2.244
3	Bungo	123.117	201.033	2.987
4	Tebo	110.004	314.110	761
5	Merangin	126.252	287.397	3.661
6	Sarolangun	82.023	116.546	2.744
7	Tanjung Jabung Barat	156.899	183.279	2.410
8	Tanjung Jabung Timur	62.904	92.417	1.347
9	Kerinci	94	10	532
Jumlah		1.041.434	1.830.035	2.210

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2020

Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batanghari pada tahun 2019 memiliki kontribusi sebesar 11 persen dari luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Produksi kelapa sawit di Kabupaten Batanghari selama lima tahun terakhir cenderung naik. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 13,71 persen dari tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2020

Gambar 1. Produksi Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Batanghari Tahun 2014-2019

Perkembangan produksi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batanghari juga diiringi dengan perkembangan luas areal yang semakin meningkat. Pada tahun 2017 produksi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batanghari meningkat sebesar 3,15 persen dari tahun sebelumnya. Sertifikasi ISPO itu sendiri mulai di galakan di tahun 2017 di Kabupaten Batanghari dan diterima pada tahun 2018 yang mana tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan produksi kelapa sawit rakyat di Kabupaten Batanghari. Selain itu, produktivitas tersebut juga merupakan produktivitas tertinggi di Provinsi Jambi diikuti oleh Kabupaten Merangin, Bungo, Sarolangun, dan Kabupaten lainnya. (Lampiran 2)

Tabel 2. Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Batanghari Menurut Status Pengusahaannya pada Tahun 2019

No	Perkebunan Rakyat	Luas Areal			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
		TBM	TM	TTM		
1	PIR-Plasma	-	8.524	-	8.524	31.426
2	Swadaya Berbantuan	1.565	1.396	-	2.961	5.505
3	Swadaya Murni	4.714	5.747	201	10.662	21.756
Jumlah		6.279	15.667	201	22.147	58.687

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari 2020

Tabel 2 menunjukkan luas areal kelapa sawit rakyat sesuai dengan status pengusahaannya yang berada di Kabupaten Batanghari. Kelapa sawit rakyat di Kabupaten Batanghari dibedakan menjadi tiga yakni Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR). Perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Batanghari terbagi menjadi beberapa kelompok yakni perkebunan rakyat kemitraan atau PIR-Plasma, perkebunan swadaya berbantuan dan swadaya murni. Menurut data Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari tahun 2019 luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya murni memiliki kontribusi sebesar 48,14 persen dari total luas areal perkebunan rakyat di Kabupaten Batanghari.

Menurut data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari Kecamatan Bajubang memiliki produktivitas paling tinggi pada tahun 2019 dengan rata-rata produktivitas di Kabupaten Batanghari sebesar 3.786 Kg/Ha Kecamatan Bajubang masih lebih unggul 4,9 persen. Selain itu Kecamatan Bajubang memiliki kontribusi luas areal perkebunan terbesar yakni sebesar 22 persen dan merupakan kecamatan dengan luas areal terbesar di Kabupaten Batanghari hal ini juga menunjukkan potensi kelapa sawit di Kecamatan Bajubang cukup besar dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Swadaya Murni di Kabupaten Batanghari Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Areal			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
		TBM	TM	TTM			
1	Mersam	959	1.161	23	2.143	4.232	3.641
2	Muara Tembesi	571	565	18	1.154	2.125	3.761
3	Muara Bulian	476	634	19	1.129	2.419	3.815
4	Batin XXIV	479	708	22	1.227	2.660	3.757
5	Pemayang	522	724	19	1.265	2.686	3.710
6	Maro Sebo Ulu	428	421	13	862	1.533	3.641
7	Maro Sebo Ilir	336	540	21	897	2.144	3.970
8	Bajubang	925	994	66	1.975	3.957	3.981
Jumlah		4.714	5.747	201	10.662	21.756	3.786

Keterangan:

- TBM (Tanaman Belum Menghasilkan)
- TM (Tanaman Menghasilkan)
- TTM (Tanaman Tidak Menghasilkan)

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari 2020

Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) diterima oleh Kelompok Tani Mutiara Bumi yang merupakan satu-satunya petani swadaya di Batanghari yang menerima sertifikasi ISPO pada tanggal 26 Juni 2019. ISPO

merupakan sebuah upaya pemerintah dalam memelihara lingkungan, meningkatkan ekonomi dan sosial.

ISPO merupakan sebuah bentuk apresiasi yang di berikan oleh pelaku usahatani yang menjalankan GAP (*Good Agriculture Practise*) yang mana petani penerima sertifikasi ISPO harus menjalankan prinsip dan juga kriteria dalam usahatani dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Adapun tujuan dari ISPO untuk petani sendiri yakni melindungi petani dari permainan harga perusahaan. Selain itu keuntungan yang seharusnya diterima oleh petani yang memiliki sertifikasi ISPO yakni terjaminnya pasar serta harga output yang dihasilkan. Namun, dalam praktiknya hal ini belum benar-benar diterapkan. Petani belum sepenuhnya menerapkan prinsip dan kriteria dalam menjalankan usahatannya dan harga yang diterima petani juga belum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 4. Harga Kelapa Sawit Menurut Harga Pemerintah, Harga Petani ISPO dan Non-ISPO

Bulan	Kebijakan Harga Pemerintah	Harga Petani ISPO	Harga Petani Non-ISPO
Desember 2020	2.151	2.000	1.800
Januari 2021	2.054	1.994	1.700
Februari 2021	2.054	1.947	1.650

Sumber:- Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2020

Harga output ataupun Tandan Buah Segar (TBS) petani bersertifikasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan petani swadaya yang non sertifikasi ISPO. Hal ini dikarenakan petani yang telah bersertifikasi memiliki jaminan harga dari pemerintah sehingga pemerintah membeli hasil dari petani ISPO dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti halnya petani di Desa Pompa Air

yang menjual hasil produksinya langsung ke PT. Asia Sawit Lestari dan perusahaan di sekitar. Meskipun harga yang diterima petani ISPO lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diterima petani Non ISPO namun harga tersebut bukan merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut konsep daya saing usahatani Person (2005) harga output dan input dapat mengindikasikan daya saing usahatani kelapa sawit rakyat. Menurut Soetriono (2006) daya saing merupakan kemampuan atau kesanggupan komoditas pertanian untuk mempertahankan perolehan laba dan pangsa pasar, sehingga produsen mempunyai kemampuan dalam memproduksi komoditas pertanian sehingga dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya. Seperti halnya kebijakan pemerintah tentang pengadaan sertifikasi ISPO untuk petani swadaya dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usahatani kelapa sawit itu sendiri dan merupakan salah satu upaya untuk membantah isu bahwa kelapa sawit Indonesia tidak ramah terhadap lingkungan, mengingat bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Provinsi Jambi.

Walaupun tidak semua usahatani yang memiliki harga jual tinggi tidak memiliki daya saing atau dapat mempertahankan usahanya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**Analisis Daya saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Usahatani Bersertifikasi ISPO di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari**”. Penelitian ini akan mengidentifikasi apakah petani bersertifikat ISPO di daerah penelitian memiliki daya saing atau tidak berdasarkan harga output dan input di daerah serta di pasar internasional.

1.2 Perumusan Masalah

Kecamatan Bajubang merupakan Kecamatan yang memiliki produktivitas tertinggi yang terdapat di Kabupaten Batanghari. Selain itu, kecamatan Bajubang merupakan salah satu kecamatan yang perkebunan kelapa sawit swadaya murni telah bersertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing kelapa sawit dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Kementrian No 11 Tahun 2015.

Faktor yang penting dalam menentukan keberlanjutan suatu usahatani kelapa sawit yaitu dari harga Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. Harga TBS petani yang bersertifikasi ISPO di Desa Pompa Air lebih tinggi 43,27 persen jika dibandingkan dengan harga rata-rata TBS di Kabupaten Batanghari. Namun selain dari harga output dalam menentukan daya saing juga dilihat dari harga input yang digunakan. Petani dalam mengusahakan usahatannya memerlukan biaya untuk memperoleh output yang diinginkan. Petani yang telah bersertifikasi ISPO harus berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip ISPO dalam mengusahakan usahatannya seperti penggunaan pupuk, tenaga kerja, serta obat-obatan. Penggunaan input sesuai dengan anjuran yang harus dikeluarkan oleh petani yang berakibat menambah pengeluaran petani dalam pengadaan input yang dapat berpengaruh pada pendapatan petani dan keberlanjutan usahatani. Sehingga perlu dilihat bagaimana keberlanjutan serta daya saing usahatani kelapa sawit yang bersertifikasi ISPO di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan fakta tersebut, timbul permasalahan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran usahatani kelapa sawit swadaya bersertifikasi ISPO di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana kondisi daya saing usahatani kelapa sawit swadaya bersertifikat ISPO di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?
3. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap penggunaan input dan produksi pada usahatani kelapa sawit rakyat bersertifikasi ISPO di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran usahatani kelapa sawit bersertifikasi ISPO di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.
2. Menganalisis daya saing usahatani kelapa sawit bersertifikat ISPO di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari
3. Menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap terhadap penggunaan input dan produksi pada usahatani kelapa sawit rakyat bersertifikasi ISPO di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata 1 (satu) di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi.

2. Sebagai gambaran mengenai daya saing usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari sebagai pertimbangan pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah.
3. Sebagai informasi mengenai kelapa sawit rakyat sebagai perencanaan pengembangan agribisnis kelapa sawit rakyat, dan dapat menjadi masukan bagi petani dan juga pemerintah dalam penetapan strategi yang akan dijalankan pada masa kini, maupun masa yang akan datang.